

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2003
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa guru dan pamong belajar sebagai pendidik mempunyai peranan yang cukup penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan nasional;
- b. bahwa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan atas dedikasi, pengabdian, dan loyalitas dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik, kepada mereka perlu diadakan Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu disempurnakan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan Satyalancana Pendidikan adalah Tanda Kehormatan Negara yang diberikan sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan negara kepada guru dan pamong belajar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Guru adalah pendidik baik yang berasal dari pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada :
 - a. Taman Kanak-kanak/Raudathul Athfal/Bustanul Athfal;
 - b. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa;
 - c. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
 - d. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan;
 - e. Sekolah Luar Biasa; atau
 - f. Sekolah Republik Indonesia di Luar Negeri.
3. Pamong Belajar adalah pendidik, pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sebagai pamong belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tempat terpencil adalah tempat yang karena letak geografis dan/atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana/prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya sehingga menimbulkan kesulitan bagi penduduk dan penghuninya.
5. Daerah khusus adalah lokasi tempat guru mengajar yang rentan atau sedang terkena bencana alam seperti banjir, gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, daerah bergejolak, lokasi pengungsian, daerah kumuh/desa tertinggal berpenduduk miskin/di bawah garis kemiskinan, baik di dalam maupun di luar kota.
6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN DERAJAT SATYALANCANA PENDIDIKAN

Pasal 2

Bentuk, ukuran, dan warna Satyalancana Pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Satyalancana Pendidikan mempunyai derajat yang sama dengan Tanda-tanda Kehormatan Satyalancana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

Satyalancana Pendidikan dapat diberikan kepada guru dan pamong belajar yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan;
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah :
 - a. melaksanakan tugasnya sebagai guru sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun secara terus menerus atau selama 8 (delapan) tahun secara terputus-putus bagi guru yang bertugas di tempat terpencil;
 - b. melaksanakan tugasnya sebagai guru sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus atau selama 6 (enam) tahun secara terputus-putus bagi guru yang bertugas di daerah khusus selain daerah bergejolak;
 - c. melaksanakan tugasnya guru sekurang-kurangnya selama 30 (tiga puluh) hari secara terus menerus atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara terputus-putus atau tewas/gugur dalam melaksanakan tugasnya, bagi guru yang bertugas di daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak;
 - d. melaksanakan tugasnya sebagai guru atau pamong belajar sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun secara terus menerus dan mempunyai prestasi besar di bidang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing serta mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Badan/Lembaga baik nasional/internasional bagi guru dan pamong belajar yang bertugas selain di tempat terpencil dan daerah khusus.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan waktu pelaksanaan tugas dan penilaian prestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur oleh Menteri.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN

Pasal 6

Satyalancana Pendidikan diberikan dengan Keputusan Presiden, atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan.

Pasal 7

Pemberian Satyalancana Pendidikan dilaksanakan dalam upacara resmi, pada peringatan :

- a. Hari Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei;
- b. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus;
- c. Hari Guru Nasional, tanggal 25 November.

Pasal 8

Pemberian Satyalancana Pendidikan dapat dilakukan secara anumerta.

Pasal 9

- (1) Pemberian penyerahan piagam.Satyalancana Pendidikan disertai dengan
- (2) Bentuk piagam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Pemberian Satyalancana Pendidikan dilaksanakan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- (2) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada pimpinan tertinggi unit kerja di lingkungannya masing-masing.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB V PEMBERIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN SECARA BERULANG

Pasal 12

Guru dan pamong belajar yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan dapat diberikan Satyalancana Pendidikan secara berulang, apabila guru dan pamong belajar yang bersangkutan memenuhi persyaratan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 13

- (1) Pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan Satyalancana Pendidikan secara berulang melekatkan tanda simbol pendidikan “Tut Wuri Handayani” yang berwarna emas pada pita gantung Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang telah dimiliki oleh guru dan pamong belajar yang bersangkutan.
- (2) Bentuk tanda simbol pendidikan “Tut Wuri Handayani” pada Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14

Pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang hanya dapat dilakukan untuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.

Pasal 15

Tata Cara Pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Satyalancana Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI WAKTU PEMAKAIAN SATYALANCANA PENDIDIKAN

Pasal 16

- (1) Satyalancana Pendidikan hanya dapat dipakai pada upacara-upacara hari besar nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Guru Nasional, dan upacara-upacara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pemakaian Satyalancana Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENCABUTAN HAK MEMAKAI SATYALANCANA PENDIDIKAN

Pasal 17

Guru dan pamong belajar yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan, dicabut haknya untuk memakai Satyalancana Pendidikan, apabila yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain;
- b. dijatuhi hukuman pidana oleh putusan Hakim Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- c. diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. menjadi anggota organisasi yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Satyalancana Pendidikan dapat diberikan kepada Warga Negara Asing.
- (2) Persyaratan bagi Warga Negara Asing untuk memperoleh Satyalancana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. bertugas sebagai guru di tempat terpencil, sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus atau 15 (lima belas) tahun secara terputus-putus;
 - b. memiliki izin mengajar dari Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. memperoleh persetujuan dari negara asal untuk dapat menerima Satyalancana Pendidikan.
- (3) Warga Negara Asing yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan, dicabut haknya untuk memakai Satyalancana Pendidikan apabila yang bersangkutan dijatuhi hukuman pidana oleh putusan Hakim

Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau dideportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Satyalancana Pendidikan kepada Warga Negara Asing dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 19

Bagi guru yang telah memperoleh Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, dapat diberikan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pemberian Satyalancana Pendidikan secara berulang.

Pasal 20

Satyalancana Pendidikan dapat diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus yang merupakan daerah berkeadilan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Nopember 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
ttd.
BAMBANG KESOWO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2003
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN

I. UMUM

Guru dan pamong belajar sebagai pendidik mempunyai peran yang sangat strategis dan merupakan faktor kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran tersebut perlu dilaksanakan di sekolah dan masyarakat sekitarnya dengan penuh dedikasi, pengabdian dan loyalitas, baik oleh guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dan pamong belajar.

Sebagai penghormatan dan rasa terima kasih atas pengabdian dan prestasi yang dicapai serta jasa yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara terutama kepada guru yang bertugas di tempat terpencil dan daerah khusus, atau guru dan pamong belajar yang berprestasi besar di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan/atau Internasional, sudah sewajarnya Pemerintah memberikan penghargaan. Dengan penghargaan seperti itu, tidak saja korps guru dan pamong belajar tetapi juga secara perseorangan akan terangkat harkat dan martabatnya. Kondisi seperti ini akan meningkatkan persaingan yang sehat antar guru dengan didasari motivasi kerja dan motivasi besar. Kondisi seperti itu akan dipetik siswa berupa penyelenggaraan proses atau kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan berkualitas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidik, baru diatur pemberian penghargaan kepada guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas di tempat terpencil dan berprestasi, sedangkan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, guru yang bertugas di daerah khusus dan yang berprestasi besar di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan/atau Internasional belum terwadahi, sehingga dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda kehormatan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berakhlak dan berbudi pekerti baik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak adalah daerah dimana terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata atau kelompok lain yang nyata-nyata dapat mengganggu, mengancam, atau merusak kredibilitas, keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwasanya guru yang ditugaskan pada daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak dapat diberikan Satyalancana Pendidikan karena yang bersangkutan berpotensi mendapatkan ancaman fisik dan jiwa.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan pemberian Satyalancana Pendidikan secara anumerta adalah pemberian Satyalancana Pendidikan yang diserahkan kepada ahli waris guru dan pamong belajar yang tewas/gugur, baik pada waktu melaksanakan tugasnya maupun karena pada saat pemberiannya yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan tersebut disamakan dengan pemberian Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pemberian secara berulang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 55 TAHUN 2003
 TANGGAL 4 NOVEMBER 2003

TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN



Medali

Miniatur

KETERANGAN:

A. BENTUK DAN ARTI GAMBAR

Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan berbentuk bundar dengan di sebelah luar setangkai kapas dan padi, terbuat dari logam berwarna perunggu.

Pada Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan terdapat belencong menyala bermotif burung garuda yang menggambarkan sifat dinamis, gagah perkasa, mampu dan berani mengarungi Tanah Air Indonesia.

Nyala api berarti keagungan dan keluhuran pengabdian tanpa pamrih.

Ekor dan sayap garuda digambarkan masing-masing lima yang berarti satunya kata dalam perbuatan.

Buku merupakan sumber ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Bidang segi lima dan bintang menggambarkan alam kehidupan Pancasila.

Sebelah belakang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA"

B. UKURAN MEDALI

Jari-jari satyalancana berikut padi dan kapas	-----17,50 mm
Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing	-----2,50 mm
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam	-----12,50 mm
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar	-----13,50 mm
Jari-jari bintang	-----2,00 mm
Jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah satyalancana	-----7,00 mm
Tinggi huruf "Pendidikan"	-----2,00 mm
Jari-jari cincin penggantung luar	-----4,00 mm
Jari-jari cincin penggantung dalam	-----2,50 mm

C. UKURAN MINIATUR

Jari-jari satyalancana berikut padi dan kapas	-----8,50 mm
Lebar tangkai padi dan kapas masing-masing	-----1,50 mm
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah dalam	-----6,50 mm
Jari-jari lingkaran titik-titik sebelah luar	-----7,50 mm
Jari-jari bintang	-----1,00 mm
Jarak antara titik tengah bintang dengan titik tengah satyalancana	-----3,00 mm
Tinggi huruf "Pendidikan"	-----1,00 mm
Jari-jari cincin penggantung luar	-----3,50 mm
Jari-jari cincin penggantung dalam	-----2,50 mm

D. WARNA DAN UKURAN PITA GANTUNG MEDALI

Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam enam bagian yang sama besarnya.

Ukuran:
Panjang -----50,00 mm
Lebar -----35,00 mm
Lebar lajur putih -----2,00 mm

E. WARNA DAN UKURAN PITA GANTUNG MINIATUR

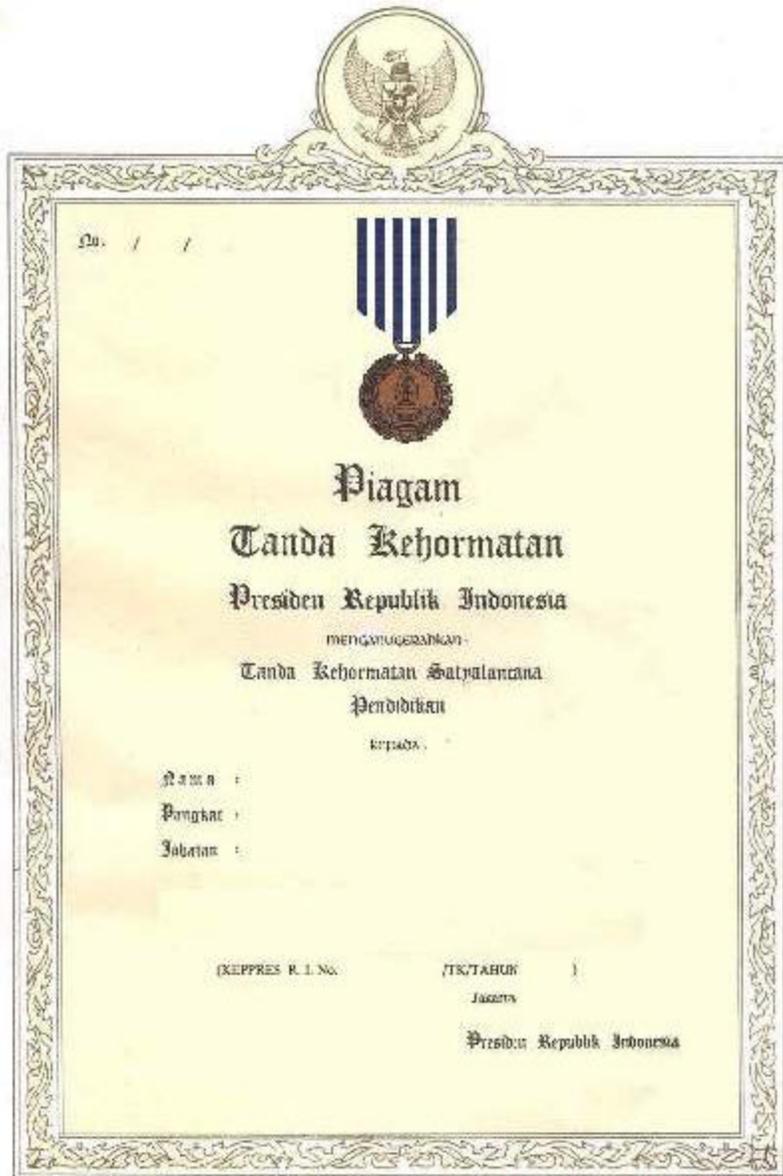
Warna dasar pita biru tua dengan lima lajur putih yang membagi dalam enam bagian yang sama besarnya.

Ukuran :
Panjang -----45,00 mm
Lebar -----20,00 mm
Lebar jalur putih -----1,00 mm

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :55 TAHUN 2003
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2003

PIAGAM TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN



KETERANGAN:

A. UKURAN PIAGAM

Panjang -----40,00 mm
Lebar -----30,00 mm

B. WARNA PIAGAM

Kuning.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :55 TAHUN 2003
TANGGAL 4 NOVEMBER 2003

TANDA ULANGAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN



TANDA ULANGAN I



TANDA ULANGAN II

KETERANGAN:

A. BENTUK TANDA ULANGAN

Simbul Pendidikan Tut Wuri Handayani

B. UKURAN

Tinggi -----8,00 mm

Lebar -----6,00 mm

C. WARNA

Emas

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI